

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Kelahiran PKB

Penyebab terbentuknya partai politik, menurut pendapat Gabriel A. Almond,³⁴ disebabkan pengalaman sejarah yang memperkuat kesadaran politik dari satu atau beberapa kelompok, dominasi suku, konflik yang sudah berjalan lama, dan dominasi suatu kelas tertentu. Kemudian bagaimana pembentukan wadah politik atau partai politik warga NU. Partai politik bukan hanya sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, tetapi juga berperan sebagai pengatur konflik.

Jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto memberikan angin segar bagi dunia perpolitikan Indonesia, juga telah mengubah konfigurasi politik di negara ini secara fundamental, khususnya tentang sistem kepartaian yang selama ini dibangun pada era orde baru. Begitu banyaknya bermunculan partai baru menunjukkan bahwa fenomena ini adalah akumulasi dari berbagai persoalan ideologi politik bangsa yang hampir tiga puluh tahun lebih diperlakukan secara diskriminatif dalam pembentukan garis kebijakan politik bangsa ini.

Peristiwa tersebut menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus

³⁴ Gabriel A. Almond, "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik" dalam Mochtar Mas' oed dan Collin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1991. Hlm, 63.

Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air untuk turut serta dalam kancah perpolitikan nasional melalui pendirian partai politik. Berbagai cara ditempuh untuk menyampaikan usulan tersebut. Ada yang datang langsung ke Sekretariat Jendral PBNU, ada yang menyampaikan melalui telepon, faksimili, telegram, surat, email dan lain-lain. Usulan tersebut datang dari perorangan, kelompok, dan pengurus daerah yang mewakili lembaga NU didaerahnya. Hampir semua usulan bernada sama, yakni agar PBNU secepat mungkin mendirikan suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU. Meskipun usulan tersebut pada intinya sama, namun permintaannya beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik, ada yang langsung mengusulkan nama partai, ada juga yang mengusulkan agar NU menjadi partai politik. Juga ada yang langsung mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk jadi pengurus parpol. Tercatat ada 39 nama partai politik yang diusulkan, dan nama yang paling banyak muncul adalah *Nahdlatul Ummah*, *Kebangkitan Umat*, dan *Kebangkitan Bangsa*. Diantara usulan yang dinilai cukup lengkap adalah dari Lajnah Sebelas Rembang yang dimotori oleh K.HM. Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.

Usulan kelompok rembang ini berawal dari pertemuan sejumlah ulama dan tokoh NU yang berembuk dikantor PWNU Jawa Timur pada hari senin 25 Mei 1998, empat hari setelah lengsernya Soeharto. Mereka membahas berbagai kemungkinan seputar lahirnya partai politik dilingkungan NU. Kemudian diumumkan pada acara *istighosah akbar II* dilapangan Makodam V/Brawijaya pada hari Ahad 31 Mei 1998. Agar lebih sempurna lagi, gagasan pendirian partai tersebut dibawa ke forum pertemuan ulama di Rembang Jawa Tengah.

Pada saat pertemuan di Rembang, lahirlah sebuah tim yang bertugas menyusun sebuah konsep pembentukan partai politik baru dilingkungan NU secara komprehensif yang diketuai oleh K.H.M. Cholil Bisri dengan sekretaris K.H. Yusuf Muhammad dan beranggoatakan sembilan kiai yang mewakili daerah Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Kemudian konsep tersebut diusulkan kepada PBNU atas nama Lajnah Sebelas Rembang.

Atas dasar itulah para kiai yang semula hanya menganjurkan melakukan *istighosah*, akhirnya merestui berdirinya partai politik dilingkungan NU. Dan sejak itu, warga Nahdliyin menuntut kepada PBNU untuk segera menindaklanjuti atas aspirasi yang telah mereka usulkan. Untuk mengabulkan tuntutan warga NU seperti itu tentu tidak mudah bagi PBNU. Para elit PBNU menanggapinya secara hati-hati, hal ini didasarkan pada keputusan hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa NU adalah organisasi yang menjaga jarak dari keterlibatan politik secara langsung.

Dengan mendirikan partai politik, berarti NU telah melakukan pengingkaran terhadap gerakan kembali ke khittah 1926 yang sudah dilakukan sejak 1984. Bila hal ini dilanggar, secara konstitusional harus diputuskan pada Mukhtamar, sebuah institusi tertinggi pembuat keputusan. Tetapi menolak tuntutan warga NU merupakan pengingkaran terhadap realitas yang ada.

Sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU secara keseluruhan. Banyak kalangan NU yang menginginkan berdirinya partai politik untuk mewartakan aspirasi politik warga Nahdliyyin. Untuk itu, langkah yang diambil PBNU cukup strategis, yaitu berketetapan bahwa NU tetap sebagai organisasi massa social keagamaan, bukan partai politik, dan tidak akan mendirikan partai politik. Namun demikian, PBNU mempersilahkan warga NU mendirikan partai politik yang dilakukan secara konseptual dan melalui pertimbangan yang matang. Akhirnya, PBNU mengadakan rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi dan memfasilitasi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin (Rais Syuriyah/koordinator harian PBNU) dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, MA (wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E, M.Sc (ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekjend PBNU). Untuk menghindari hambatan organisatoris, Tim Lima dibekali Surat Keputusan

PBNU. Tim Lima ini menjadi wadah untuk membentuk partai politik sebagai penampung aspirasi politik warga NU.

Untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja tim ini, rapat harian Syuriyah dan Tanfidziah PBNU pada 20 Juni 1998 memutuskan untuk memberi Surat Tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang beroanggotakan sembilan orang untuk membantu Tim Lima dalam melaksanakan tugasnya. Tim Asistensi diketuai oleh Drs. Arifin Junaedi, MBA (wakil Sekjend PBNU), dengan anggota H. Muhyidin Aburusman, HM Fachri Toha ma'ruf Lc, Drs H. Abdul Aziz MA, Drs H. Andi Muarly Sunrawa, HM. Nasihin Hasan, H.Lukman Saifudin Zuhri, Drs Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar.

Pada tanggal 22 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998, kedua tim tersebut mengadakan konsunyering di villa La Citra yang bertempat di Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai politik. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan naskah deklarasi.

Hal-hal pokok yang dirancang dalam Pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik adalah perlunya kehidupan yang lebih demokratis dan dikembalikannya kedaulatan kepada rakyat. Mabda' Siyasiy antara lain memuat visi, misi dan strategi partai politik. Hubungan partai politik dengan NU antara

lain memuat hubungan historis, cultural dan aspiratif antara partai politik dengan NU. Sedangkan struktur dan lambang partai politik dimuat dalam rancangan AD/ART. Setelah dibahas dalam berbagai diskusi secara intensif, rancangan-rancangan itu dibawa ke Silaturahmi Nasional ulama dan tokoh NU di Bandung, 4-5 Juli 1998 untuk memperoleh masukan. Silaturahmi tersebut dihadiri oleh peserta PWNU, penggagas, ulama dan tokoh NU.

Setelah melalui banyak proses, Tim Lima dan Tim Asistensi akhirnya menyerahkan hasil dari rancangannya kepada rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 22 Juli 1998 untuk kemudian diserahkan kepada pengurus partai politik yang akan menjabat dengan dokumen dan aturan mainnya. Hasil tim inilah yang kemudian berwujud Partai Kebangkitan Bangsa yang secara resmi dideklarasikan pada 23 Juli 1998 dikediaman KH Abdurrahman Wahid di Ciganjur Jakarta Selatan. Sesuai dengan harapan warga NU, Partai Kebangkitan Bangsa diharapkan dapat membangun bangsa dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia bersama komponen lainnya.

Mengenai nama Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Dur dalam sambutannya pada acara deklarasi PKB mengatakan, bahwa kata kebangkitan diambil dari kata *nahdhah* dalam bahasa Arab. Sesuai dengan Undang-undang negara Indonesia yang melarang penggunaan bahasa asing, nama partai akhirnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kebangkitan. Sedangkan penamaan dan penyematan kata bangsa, dan bukan menggunakan kata-kata lain seperti ummat, menurut Gus

Dur cukup sederhana; jangan-jangan nanti kalau menggunakan Partai Kebangkitan Ummat, UJ menetapkan lain, artinya tidak boleh menggunakan kata-kata berbahasa Arab. Oleh karena itu, sebagaimana penggalan kata Gus Dur berikut, kata bangsa lebih pas dan bisa diterima semua kalangan.

Selanjutnya, sebagai landasan perjuangan PKB disektor structural, dirumuskan *mabda' siyasiy* (titik tolak politik) dengan pendekatan *fiqh siyasiy* dalam bernegara, sebagaimana telah menjadi bagian dari tradisi. Posisinya dengan NU, disamping partai berdirinya difasilitasi NU, PKB diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah kedepan yang nantinya lebih berupaya untuk memberikan wadah bagi kalangan NU untuk berjuang pada lini struktural dengan berkecimpung dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat, sedangkan NU dalam kerangkanya tetap berbasis pada gerakan yang sifatnya kultural.

Kelahiran PKB memang tidak bisa dilepaskan dari tata aturan yang selama ini dipakai dan dipegang teguh serta menjadi landasan dalam tubuh NU. Namun kelahiran PKB tetap bersifat professional, dalam artian lahirnya partai politik yang bernama PKB tidak menyeret-nyeret regulasi ke-NU-an sebagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, tetapi sesuai dengan garis-garis pemikiran dan syarat berdirinya sebuah partai politik. NU hanya menjadi mediator PKB dalam mengambil sikap serta menyediakan pangsa pasar dari orang-orang NU dengan tanpa mencampuradukkan keduanya.

B. Deklarasi PKB

Pada hari kamis 23 Juli 1998, merupakan hari yang sangat bersejarah bagi warga NU karena partai politik yang ditunggu-tunggu kehadirannya dideklarasikan di rumah Gus Dur yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua umum PBNU di Ciganjur Jakarta Selatan. Ribuan warga NU tumpah ruah berkumpul di lapangan yang cukup luas yang jaraknya sekitar 25 meter dari rumah Gus Dur.

Timbul pertanyaan kenapa partai politik warga NU yang dinilai oleh banyak pengamat akan menjadi salah satu partai besar tidak dideklarasikan di lapangan yang cukup representatif yang bisa menampung banyak massa, mengingat NU adalah salah satu organisasi sosial keagamaan yang cukup besar di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa PKB adalah partai yang direstui dan diberi fasilitas khusus oleh para elite PBNU, yang tokoh sentralnya adalah Gus Dur, sehingga Gus Dur dan NU tidak bisa dipisahkan. K.H Yusuf Hasyim sebagai paman Gus Dur menyatakan "NU is Gus Dur, Gus Dur is NU" (Republika, 2 Desember 1994). Maka sangat strategis deklarasi PKB dilaksanakan di rumah Gus Dur, meskipun diselenggarakan di tempat dan dengan cara yang sederhana, jauh dari kesan glamor dan mewah, tetapi mempunyai nilai publikasi yang jitu, bahkan menjadi berita utama diberbagai media massa. Ini menunjukkan bahwa Gus Dur dengan NU-nya mempunyai daya tarik pemberitaan yang luar biasa.

Banyak tokoh ternama yang hadir pada acara deklarasi partai ini, diantaranya mantan wakil presiden RI Jend Purn Tri Sutrisno, mantan Menhankam Jend Purn Edi Sudrajat, mantan Wakasad Letjen. Purn Soerjadi, dan mantan Kabakin Letjen. Purn Arie Sadewo, juga dihadiri duta besar Palestina yaitu Rabhi Awad. Para tokoh ini terlebih dahulu menjumpai Gus Dur yang masih dalam pengawasan dokter sebelum duduk di panggung tempat diadakannya deklarasi PKB.

Para anggota DPP Partai Kebangkitan Bangsa dilantik dan dibai'at dihadapan para ulama dan tokoh elite NU, juga disaksikan para dewan pengurus wilayah NU dari seluruh Indonesia yang menyempatkan diri hadir pada acara deklarasi, disamping itu disaksikan ribuan warga NU, dan simpatisan baik itu muslim maupun non-muslim, serta beberapa para tokoh-tokoh yang turut menghadiri deklarasi tersenut.

Pelantikan sekaligus pembai'atan anggota DPP Partai Kebangkitan Bangsa diatas panggung deklarasi merupakan beban moral dan tanggung jawab yang harus dipikul dipundak angota sebagai amanah, yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan platform partai dengan motto "membela yang benar". Membela kebenaran harus diletakkan pada posii paling atas dalam kebijakan dan perjuangan partai. Ini berarti bahwa seseorang yang duduk dalam kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa, baik dari tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang dan rantin bukan semata-mata dijadikan sarana untuk mendapatkan jatah kursi di

lembaga dewan perwakilan, bukan untuk mencari kedudukan yang terhormat dimata masyarakat, dan bukan untuk meraih kemudahan ambisi pribadi berkaitan dengan jabatan di jajaran birokrasi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, agar bisa cepat keluar dari krisis yang dating bertubi-tubi, serta mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk mengangkat martabat kehidupan masyarakat ke derajat yang lebih mapan baik dari aspek kehidupan dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

C. Tokoh-tokoh yang Membidani Lahirnya PKB

Munculnya PKB hingga menjadi seperti sekarang ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran besar para kiai dalam proses kelahirannya. Kiai adalah figure dalam tradisi NU yang selalu diminta saran sekaligus pendapat dalam setiap pengambilan keputusan di organisasi ini. PBNU pun merupakan markas besar parta yang juga dihuni oleh sebagian besar kiai berpengaruh ditingkat nasional.

Menurut *mabda' siyasiy* PKB, ada lima orang yang turut serta membidani proses lahirnya partai ini mulai awal dari akhir. Mereka adalah tokoh PBNU, yaitu KH M. Ilyas Ruhiyat, KH Moenasir Ali, KH A. Muchith Muzadi, KH Mustofa Bisri, dan tokoh yang tidak pernah terlewatkan, KH Abdurrahman Wahid. Kelima tokoh ini bersama ulama-ulama dan tokoh NU lainnya mendeklarasikan PKB tepatnya pada tanggal 23 Juli 1998. Deklarasi tersebut merupakan puncak dar peran aktif PBNU membidani kelahiran PKB. Dejarah

partai baru yang lahir dari rahim NU pun dimulai. Hari itu adalah momentum yang tidak akan pernah terlupakan dan akan selalu dikenang sepanjang masa, khususnya bagi Nahdlatul Ulama dan PKB, serta bagi warga nahdliyin.

Gus Dur sendiri adalah sosok yang tidak mungkin dinegasikan sebagai konseptor awal pendirian partai kebanggaan warga nahdliyin tersebut. Dia adalah cucu pendiri NU yaitu KH Hasyim Asy'ari yang menjadi ikon tunggal dalam tubuh partai ini. Pada awal munculnya gagasan pendirian partai, Gus Dur selaku pengemban amanat warga *jam'iyah* yang rata-rata sudah tidak sabar lagi menanti munculnya partai baru, nampaknya tidak mampu terlalu lama menahan desakan arus bawah. Pada waktu itu Gus Dur menjabat sebagai ketua umum Tanfidziyah NU. Itu artinya sesungguhnya gagasan awal mendirikan PKB bukanlah kemauan Gus Dur semata, tetapi murni aspirasi mayoritas warga NU yang menekan Gus Dur untuk melakukan itu. Maka peranan Gus Dur semestinya dipahami tidak lebih sebagai bidan atau fasilitator yang ditugasi oleh PBNU.

Bila melihat prosesnya kebelakang sejak banyaknya usulan dan saran yang masuk ke PBNU, tentunya banyak kiai dan tokoh-tokoh NU yang membidani kelahiran PKB tidak terbatas pada orang-orang yang saat itu menjabat sebagai pengurus di PBNU, baik Syuriah maupun Tanfidziyah. Berdirinya PKB tidak pula hanya tergantung pada kinerja Tim Lima dan Tim Asistensi. Sebab, para kiai *khos* di daerah-daerah yang justru lebih banyak dan tidak ingin tersita pada jabatan struktural di PBNU juga mempunyai andil yang sama besarnya.

Banyak kiai besar yang memangku pondok pesantren yang cukup dikenal dikalangan masyarakat terutama warga NU, member masukan dan nasehat secara konsisten mengenai harapan dan pendirian sebuah partai yang difasilitasi NU. Bahkan, dikalangan para kiai tersebut tidak sedikit yang memberikan usulan yang sangat strategis bagaimana seharusnya prosesi dan mekanisme pendirian partai politik ditubuh NU. Agar lebih hati-hati dan tidak sekali-kali melupakan kesejarahan NU yang dulunya pernah menjadi partai politik, serta saran-saran lainnya yang bersifat konstruktif.

Yang paling penting dalam mencermati para tokoh dibalik layar tersebut adalah banyak diantara para ulama tersebut yang terlebih dahulu mengantisipasi mengenai posisi NU-PKB nantinya. Sebab, lebih baik baik menegaskan posisi masing-masing dan prosedur yang selama ini menjadi patokan ditubuh NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang tidak hanya terbatas oleh satu partai saja. NU adalah milik semua warga nahdliyin dan bangsa Indonesia, bukan hanya PKB.

Kondisi ini sangat relevan dengan situasi yang terjadi pasca munculnya banyak partai yang berhaluan Islam, bahkan dengan latar belakang Nahdatul Ulama. Apalagi situasi cukup memanas menjelang dimulainya perayaan kampanye pemilu 1999, para juru kampanye partai satu dengan partai lain mencoba merebut pangsa pasar NU, satu sama lain saling mengklaim. PKB sebagai partai yang difasilitasi NU menganggap paling layak dipilih karena proses

panjang pendiriannya tidak bisa dilepaskan dari campur tangan NU, berbeda dengan partai lain yang juga didirikan oleh tokoh NU, namun tidak mempunyai kredibilitas dimata PBNU seperti halnya PKB. Tokoh-tokoh yang mengawal dan mengurus PKB pasca didirikannya partai ini adalah jawaban konkritnya, meskipun beberapa kalangan menganggap PKB terkesan mengandung unsur nepotisme karena yang duduk di jajaran struktural PKB tidak jauh dari keluarga, kerabat, dan orang dekat Gus Dur.

Sementara itu, pilihan Gus Dur pada sosok Matori Abdul Jalil sebagai ketua umum pertama PKB juga didasarkan atas pertimbangan matang. Disamping pengalamannya yang luas, hubungannya dengan orang-orang dan golongan non-NU juga cukup bagus. Sehingga adanya protes atas pengangkatan Matori diabaikan Gus Dur. Dia juga menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai sekretaris jenderal PKB juga tidak lain dalam rangka penyiapan PKB sebagai partai anak muda. Lebih daripada pertimbangan diatas, sangat jelas sekali keinginan Gus Dur untuk menjadikan PKB sebagai partai yang tidak terlepas dari perjalanan perjuangan politik sebelumnya, yaitu seluruh rangkaian dari gerakan pro-demokrasi yang selama ini keduanya terlibat bersama Gus Dur, mulai dari gerakan forum demokrasi, YKPK, dan gerakan menentang otoritarianisme dalam berbagai variasinya.

Terlepas dari berbagai macam konflik dan perpecahan yang terjadi ditubuh PKB dalam proses perjalanannya, pada prinsipnya orang-orang yang dipilih untuk

mengawal PKB haruslah berwawasan ke-kaia-an, tunduk pada kiai, da memahami dinamika kiai, terutama kiai NU. Sebab PKB tidak mungkin akan berdiri tanpa sentuhan dan pertimbangan matang para kiai. Itulah mengapa Salahudin Wahid pernah berujar; “GusDur percaya bahwa seorang kiai adalah segalanya, sosok *sarwa linuwih* yang mampu member jawaban atas peristiwa yang sedang bahkan yang akan terjadi”. Eksistensi PKB berarti juga menunjukkan eksistensi kiai.

Sementara itu, kelahiran PKB adalah buah dari ketepatan mengambil keputusan disaat momen yang pas. Reformasi sebagai manifestasi tergulingnya penguasa yang tiran digadang-gadang menjadi awal proses demokratisasi kembali, setidaknya-tidaknya sama dengan ketika NU pernah menjadi partai besar. Namun, untuk meraih soliditas ditengah-tengah warna kiai yang cukup baragam tentu saja susah. Sebenarnya suara-suara diluar justru menganggap NU telah cukup dewasa berpolitik dengan keragaman tersebut. Apalagi GusDur sebagai motor pembongkar kemapanan berfikir para kiai cukup berani tampil garang didepan. Tekanan-tekanan sebagian kiai pada saat tokoh-tokoh yang membidani PKB memberanikan diri mengikrarkan partai ini justru dianggap sebagai momen proses demokratisasi internal NU. Jadi, titik tekan mengapa kelima deklarator PKB mengambil sikap cepat mendeklarasikan partai ini bukan karena pertentangan atau perbedaan diantara sikap para kiai yang sudah semenjak zaman dahulu, tapi semata-mata ingin mengawali demokrasi dari dalam, dan GusDur adalah aktornya.

D. Visi Misi PKB

Sebagai wadah penyaluran aspirasi politik warga nahdliyin, PKB tentu saja memiliki visi, misi, sekaligus cita-cita politik yang sedikit banyak bersumber dari landasan politik NU. Visi merupakan manifestasi mengaplikasikan misi partai yang berlandaskan mabda' siyasiy, cita-cita politik, asas dan perjuangan serta program-program partai. Oleh karena itu, visi dan misi partai ini adalah dua hal yang saling berkaitan erat satu sama lain.

Mabda' siyasiy sebagai landasan utama PKB dan berisikan sembilan poin pernyataan didalamnya adalah pengejawantahan visi dan misi partai secara umum. Visi dan misi partai ini dapat digolongkan menjadi beberapa sub seperti tersebut diatas. *Pertama*, cita-cita politik PKB, yakni terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, merdeka, dan berdaulat, yang terjamin hak-hak asasinya, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan keselamatan dari segala bentuk penganiayaan, kebebasan dari pemaksaan agama, perusakan keturunan serta kebebasan harta benda secara sah. (dokumen historis PKB)

Kedua, asas dan prinsip perjuangan PKB sebagai penjelas misi partai, yakni seperti bunyi lima sila dalam Pancasila. Pada anggaran dasar (AD) partai, ini termaktub dalam pasal 3 PKB tahun 1998-2000. *Ketiga*, sifat dan fungsi kebangsaan, demokratis, dan terbuka (pasal 5 AD PKB tahun 1998-2000). Sedangkan pasal 6 dengan tahun yang sama, PKB mempunyai fungsi sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membeda-

bedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama, dan profesi. PKB juga berfungsi sebagai wadah meningkatkan pendidikan, kesadaran, partisipasi politik, saluran aspirasi politik rakyat, serta sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat didalam lembaga politik.

Keempat, tujuan dan usaha PKB sebagai penjelas visi partai, yakni mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI srebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secra lahir dan batin, material, spiritual, serta mewujudkan tatanan politik tang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakulkarimah. *Kelima*, garis perjuangan PKB yang dalam hal ini meliputi prinsip dasar perjuangan dan politik partai. *Keenam*, program kerja PKB sebagai penjelas visi PKB yang meliputi seluruh aspek kehidupan , mulai ekonomi, agama, politik, HAM, hokum, kesejahteraan social, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Seperti disinggung diatas, visi dan misi PKB tetap tidak bisa dilepaskan dari visi misi NU. Sementara NU sendiri sebagai upaya mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar paham keagamaan yang membentuk kepribadian khasnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai kKhittah NU. Karena visi sekaligus misi PKBmemang tidak bisa dilepaskan dari Khittah NU, maka terlebih dahulu kita harus memahami betul apa sebenarnya khittah tersebut. Pengertian khittah NU adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku

perseorangan maupun organisasi serta dalam proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah paham Islam ahlusunnah wal jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar keagamaan maupun kemasyarakatan. Khittah NU juga digali dari intisari perjalanan khidmahnya dari masa ke masa.

Dasar-dasar paham keagamaan NU sendiri merujuk pada sumber ajaran Islam: Al-qur'an, Assunnah, Ijma'. Dan Qiyas. Disamping itu, dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya tersebut diatas, NU mengikuti paham Ahlusunnah wal jamaah dan menggunakan jalan pendekatan (madzhab): bidang aqidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, bidang fiqh mengikuti Abu Hanifah AN-nu'man, Imam Malik Bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-syafi'I dan Imam Ahmad Hambal, seta bidang tasawuf mengikuti Imam Al-junaid Al-bugdadi dan Imam Al-ghazali serta imam-imam yang lain. NU juag mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri dan menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia.

Sebagai pedoman pamugnkas, sikap terpenting yang berkeaan dengan hubungan kemasyarakatan NU adalah landasan utama yang nantinya juga menjadi bagian literature visi-misi PKB. Sikap tersebut sudah menjadi trade mark tetap NU, yakni bercirikan *tawassuth* (adil ditengah-tengah kehidupan bersama) dan *I'tidal* (lurus), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang) serta *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Pedoman-pedoman diatas lebih banyak bersumber dari ajaran pokok NU, sebagian juga misi PKB. Hubungan PKB-NU yang memunculkan nilai-nilai produksi NU kedalam tubuh PKB, tidak bisa juga ikut membawa perangkat-perangkat nilai ideologis yang telah digariskan para kiai. Itu artinya, misi PKB kedepan sebagai partai yang terbuka, modern, menjunjung profesionalitas sekaligus mampu menjawab tantangan-tantangan kedepan tentu lekat dengan misi yang diemban NU saat ini. Hanya saja koridor perjuangan yang digariskan atas keduanya cukup jelas: NU berada diluar jalur politik dan meneguhkan misinya melalui perjuangan diluar sistem (pemerintahan), sementara PKB membawa misi tersebut kedalam arena kontestasi politik demi memperkuat sekaligus memberikan peluang besar tercapainya visi partai.

E. Platform PKB

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, sejahtera lahir batin, didunia serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani, dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama. Musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya, dan persamaan kedudukan setiap warga Negara didepan adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.
3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat yang beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya, yang meliputi: terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kebebasan dan kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan, terpeliharanya agama

dan larangan adanya pemaksaan agama, terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat, terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus dan terpeliharanya harta benda. Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemungkaran.

4. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan tersebut tidak bisa dan tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan public. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan public melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar system politikekonomi, hokum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Partai kebangkitan bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang diberukan kepada umat manusia, yang oleh manusia hanya boleh diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian mengemban amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu member rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu harusla dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaanya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu tidak terbatas dan tidak memusatkan disatu tangan, serta berada pada mekanisme

system yang institusionalistik, bertumpu pada kekuasaan individualistic, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa yang pluralistic yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tata kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Ynag Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bgi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai pancasila tersebut harus dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan persaudaraan antar sesama yang terkandung dengan ikatan keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integrative, tanpa harus saling dipertentangkan antara yang satu dengan yang lainnya.



8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanism religius, amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara santun dan akhlakul karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicita-citakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.
9. Partai kebangkitan Bangsa adalah partai yang terbuka dalam pengertian lintas agama, lintas suku, lintas ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk misi, visi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai bersifat independen dalam pengertian menolak intervensi segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

F. Hubungan PKB dengan NU

Catatan sejarah telah menunjukkan bahwa NU selalu memberikan kontribusi bagi pembanguna kesadaran politik bangsa Indonesia. Namun demikian, selama lebih dari tiga dasawarsa kekuasaan orde baru yang monolitik dan otoriter telah mengerdilkan potensi politik warga NU secara sistematis. Sejalan dengan semangat reformasi, warga Nu berusaha membangun kembali potensi politiknya sebagai bagian dari kesinambungan tradisinya berpartisipasi dalam pembangunan politik bangsa Indonesia.

Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa merupakan suatu bentuk respon warga NU tuntutan reformasi di bidang politik dan terhadap kehendak penyaluran aspirasi politik kaum Nahdliyin secara bebas dan demokratis. Guna menghindari kejumuhan antara partai sebagai wadah aspirasi politik warga NU dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang menjadi perekat keagamaan mereka, maka diperlukan pedoman pengaturan yang jelas dan tegas. Pedoman ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi setiap warga Jam'iyah NU yang berkiprah sebagai anggota atau aktivis partai.

NU telah menetapkan landasan pembangunan politik bangsa, serta pandangan dan sikap politik sebagaimana termaktub dalam berbagai keputusan Muktamar, diawali dari Muktamar ke-27 di Situbondo, Muktamar ke-28 di Yogyakarta, hingga Muktamar ke-29 di Tasikmalaya.

Dalam mewujudkan tata kehidupan politik, NU telah menetapkan pandangan dan sikap politik sebagai berikut :

1. Hak berpolitik merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara yang harus dilaksanakan sesuai dengan *akhlaqul karimah* sebagai pelaksanaan ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama'ah.
2. Pelaksanaan hak berpolitik harus ditempatkan didalam kerangka mengembangkan budaya politik bangsa Indonesia yang sehat dan bertanggung jawab.
3. Praktek berpolitik harus berada dalam kerangka integrasi bangsa dan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
4. Praktek berpolitik harus dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, adil, sesuai dengan aturan dan norma yang telah disepakati, serta lebih mengedepankan musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
5. Praktek berpolitik warga negara, khususnya warga NU, yang berbeda aspirasi politiknya harus berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, dan saling menghargai .
6. Potensi organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dari dan untuk masyarakat sendiri, harus diberi ruang yang cukup dan dipupuk agar memiliki kekuatan yang semestinya dalam melaksanakan

fungsinya sebagai sarana kebebasan berkumpul dan berserikat, serta menyalurkan aspirasi.

7. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang agama, NU tidak terikat secara organisatoris dan struktur dengan partai/organisasi politik manapun.
8. Keanggotaan warga NU dalam suatu partai/organisasi politik bersifat perorangan dan setiap warga NU dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui partai/organisasi politik yang mereka kehendaki, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan Jam'iyah.
9. Keterpisahan NU secara organisatoris dengan suatu partai/organisasi politik, diwujudkan antara lain melalui larangan perangkapan jabatan kepengurusan harian partai/organisasi politik manapun dengan kepengurusan harian dilingkungan Jam'iyah NU.

Sebagai wadah penyaluran aspirasi politik kaum Nahdliyin, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki cita-cita politik yang bersumber dari landasan politik NU. Cita-cita politik yang dimaksud adalah terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, merdeka dan berdaulat, yang terjamin hak-hak asasinya, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan keselamatan dari segala

bentuk penganiayaan, kebebasan dari pemaksaan agama, perusakan keturunan, serta kebebasan harta benda secara sah.

Cita-cita yang demikian itu akan dicapai oleh Partai Kebangkitan Bangsa melalui keterlibatan dalam penetapan kebijakan public, yakni melalui jalur kekuasaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan tentang pemberdayaan masyarakat lemah dan terpinggirkan, perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas, serta penegakkan sistem ekonomi, politik dan budaya yang berlandaskan kedaulatan rakyat.

Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, kekuasaan pada hakekatnya adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kekuasaan yang dimiliki manusia merupakan titipan-Nya yang dianugerahkan kepada umat manusia, yang hanya boleh diamanatkan kepada pihak lain yang berkemampuan dan berkeahlian, serta memiliki kejujuran, keadilan dan daya juang yang berpihak kepada pemberi amanat.

Dengan merujuk kepada landasan politik NU dan cita-cita politik partai, maka setiap anggota dan aktivis Partai Kebangkitan Bangsa harus mengembangkan pola hubungan dengan NU yang bersifat *historis, cultural, dan aspiratif*.

Hubungan historis berarti, setiap anggota dan aktivis Partai Kebangkitan Bangsa menyadari partai ini dirintis dan dilahirkan oleh sejumlah warga NU secara perorangan, sebagai wujud nyata kepedulian mereka terhadap masa depan

kehidupan politik bangsa dan tekad melaksanakan cita-cita politik NU dalam upaya mengangkat harkat dan martabat warganya. Dengan demikian keterikatan historis ini bermakna *dzikra*, yaitu peringatan yang selalu melekat dalam hati dan substansinya, selalu menjiwai seluruh aktivitas politik anggota dan aktivis partai.

Hubungan kultural berarti, setiap anggota dan aktivis Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa partai ini lahir dari suatu lingkungan kebudayaan yang dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan yang khas, yaitu lingkungan kebudayaan yang dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan Islam Ahlusunnah wal Jama'ah. Oleh karena itu, setiap anggota dan aktivis partai, baik secara perorangan maupun kolektif harus selalu konsisten memperjuangkan kelestarian lingkungan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan tersebut, tanpa harus menghindari kemungkinan perubahan sebagai Sunnatullah.

Hubungan aspiratif berarti, setiap anggota dan aktivis Partai Kebangkitan Bangsa memahami sepenuhnya bahwa NU sebagai sebuah Jam'iyah memiliki landasan, pandangan dan sikap politik bahwa setiap warga Jam'iyah NU yang menjadi anggota dan aktivis partai, harus turut memperjuangkan landasan pandangan dan sikap politik tersebut dalam keseluruhan gerak dan langkah partai.

G. Antusiasme Massa Pendukung PKB

Gema kebangkitan PKB cukup menggugah semangat warga NU untuk menatap masa depan yang lebih cerah, setelah 32 tahun dibawah ketiak kekuasaan

rezim Soeharto menjadi kelompok yang selalu dipinggirkan. Setelah PKB dideklarasikan dikediaman Gus Dur, partai ini segera menyebar keseluruh penjuru nusantara karena pengurus wilayah NU hingga pengurus tingkat cabang sama-sama beranggapan perlunya PKB didirikan didaerah masing-masing. Bahkan untuk tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan dengan segera mendirikan PKB, sebagai dukungan total kepada PBNU yang member fasilitas. Semua ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme dan dukungan masyarakat NU PKB.

Daya tarik pembentukan PKB tidak hanya menggema didalam negri saja, diluar negri pun semisal di Amerika Serikat, yang memiliki banyak pengamat politik tentang Indonesia, rasa ingin tahu juga besar. Ini tercermin dari Dr. Alwi Shihab, MA salah seorang ketua PKB bidang urusan luar negri melalui video klip karena tidak bisa hadir langsung bertajuk Indonesiaku menyanyi, berdurasi 15 menit, dan diproyeksikan dalam tiga layar berukuran besar. Gus Dur pun memberikan sambutan disela-sela acara itu.

Sedangkan Matori Abdul Jalil yang menjabat sebagai ketua umum PKB dalam pidato politiknya menyatakan bahwa PKB adalah partai yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lahir digarda NU, tetapi semangat dan jiwa kebangsaanya menyatu dengan nafas rakyat Indonesia. PKB berkepentingan untuk menjadi penggerak demokrasi dan pengikat simpul persaudaraan bangsa. Matori juga mengajak seluruh kaum Nahdliyin yang selama ini tercerai berai dimana-mana untuk bergabung dan bernaung dirumah sendiri,

yaitu PKB. Sangat tidak bijaksana jika seseorang yang sudah memiliki rumah masih suka keluyuran dan menginap di rumah orang lain, ungkapnya. Sebagai agregasi dari kepentingan dan artikulasi politik rakyat, PKB ingin mewujudkan masyarakat sipil yang kuat, mandiri, dan mampu mengatasi kekuasaan yang otoriter. PKB ingin tampil didepan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat secara luas (Jawa Pos, Kompas, Bernas 19/10/1998).

Peristiwa serupa juga terjadi di provinsi Jawa Timur yang tidak kalah meriah dengan yang berkangsong di Jakarta. Jawa Timur sebagai basis utama PKB mendapat julukan baru yaitu provinsi PKB, menggelar pelantikan pengurusnya secara missal di agelora Tambaksari Surabaya 6 Desember 1998 yang dihadiri sekitar 28.855 simpatisan yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Masing-masing terdiri dari 155 pengurus DPW, 3700 pengurus DPW (terdiri dari 37 daerah tingkat 2) dan 25 ribu pengurus anak cabang (500 kecamatan). Disamping itu ditambah lagi dengan pengurus ranting se Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yang jumlahnya sekitar 20 ribu orang.

Seluruh pengurus PKB yang jumlahnya sekitar 48 ribu itu memakai jas kebesaran PKB berwarna hijau. Mereka semua menempati tribun gelora secara melingkar. Sedangkan warga PKB dan para simpatisannya ditempatkan ditengah lapangan, mayoritas memakai pakaian warna putih. Sehingga warna putih yang

tampak ditengah lapangan itu seperti sabuk hijau yang melingkari tribun Gelora Tambaksari, Surabaya.

Acara rapat akbar PKB yang dihadiri lebih dari seratus ribu massa PKB ini dimeriahkan atraksi seperti drum band, hadrah kolosal, penyulutan mercon ditubuh Sembilan pendekar Pagar Nusa, banner yang digantungkan di kaki helicopter mengelilingi kota Surabaya. Menariknya lagi, kesenian asal negri tirai bamboo juga ikut dipampilkan yaitu tarian barongsai liong-liong atau tarian naga sumbangn dari warga PKB keturunan Cina. Dalam tarian ini, sang naga naik keatas panggung dari mulutnya keluar bendera PKB yang dijulurkan kepada salah seorang pengurus PKB.

Sementara itu, ketua PWNU drs. K. H. Hasyim Muzadi dalam pidato politiknya menyatakan, NU terpaksa memenuhi keinginan warganya untuk membentuk partai politik. Mengingat, suara warga NU yang selama ini dititipkan dimana-mana ternyata tidak pernah kembali atau member manfaat kepada NU. Bahkan dibawa lari kemana-mana sehingga menimbulkan krisis dan perpecahan bangsa.

Kalau Indonesia dibawah kendali ulama melalui PKB, maka tidak mungkin akan timbul perpecahan di Indonesia, karena PKB adalah mandataris ulama yang akan menyebarkan nilai-nilai agama sekaligus menyebarkan pengayoman. Kalau agama dibawa orang yang hanya mengatas namakan agama, maka justru akan timbul kekacauan dan Islam bisa dicap sebagai sumber

kekacauan. Ucapan ini seolah dipraktekkan oleh panitia dan Banser dengan menjaga gereja di beberapa kawasan yang dilalui massa PKB, sehingga umat Kristiani dalam menjalankan ibadah tidak merasa terganggu, justru merasa terayomi.

Kemeriahan acara deklarasi PKB, baik ditingkat wilayah maupun cabang, tidak hanya didominasi provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta, yang mendapat sambutan massa pendukungnya dengan mengadakan konvoi kendaraan bermotor. Di daerah-daerah lain pun, baik dalam maupun luar Jawa sambutan massa pendukung PKB ketika acara pendeklarasiannya membuat kagum banyak. Ini bisa dilihat dari pemberitaan media massa, baik local maupun nasional. Acara-acara yang diadakan PKB merupakan sumber berita yang tidak pernah kering bagi para pencari berita berkaitan dengan mobilisasi massa pendukungnya, lebih-lebih dengan tokoh sentralnya, yaitu Gus Dur.